KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telp 021 – 7989925
www.kemendesa.go.id

Jakarta, 05 Agustus 2026

Nomor : 098/PBJ.01.01/SPPBJ/VIII/2026
Lampiran : -

Kepada Yth.
Soni Jausman selaku Direktur PT. Ernusa Abadi KSO CV. Berkat How Papua
JL. Harapan 1 No. 30, Jakarta Timur, DKI Jakarta

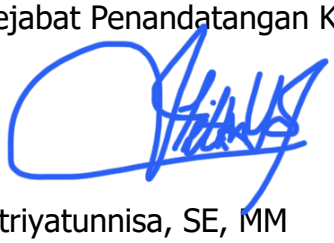
Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di tingkat Desa pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 23 Juli 2026 tentang Penawaran Pekerjaan Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di tingkat Desa pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.738.252.696,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perintah Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fitriyatunnisa, SE, MM
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
NIP: 19780919 201102 2 001

Tembusan Yth. :
1. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
2. APIP Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Pokja Pemilihan 8 pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.